



## Humaniora

Sabtu, 26 November 2005

Search :

- Rubrik**
- [Berita Utama](#)
- [Metropolitan](#)
- [Nusantara](#)
- [Bisnis & Keuangan](#)
- [International](#)
- [Opini](#)
- [Olahraga](#)
- [Politik & Hukum](#)
- [Humaniora](#)
- [Jawa Barat](#)
- [Sosok](#)
- [Sumatera Bagian Utara](#)
- [Sumatera Bagian Selatan](#)
- Berita Yang lalu**
- Otonomi**
- Ilmu Pengetahuan**
- Perkelaran**
- Audio Visual**
- Rumah**
- Teropong**
- Teknologi Informasi**
- Muda**
- Swara**
- Pendidikan Dalam Negeri**
- Musik**
- Sorotan**
- Dana**
- Kemanusiaan**
- Properti**
- Bentara**
- Wisata**
- Fokus**
- Telekomunikasi**
- Ekonomi Rakyat**
- Pustakaloka**
- Jendela**
- Ekonomi Internasional**
- Bahari**
- Pendidikan Luar Negeri**
- Otomotif**
- Furnitur**

### Hargai Hak Komunitas Lokal

Jakarta, Kompas - Pengelolaan ekosistem oleh negara, pemerintah daerah, maupun sektor swasta sering kali mengabaikan hak asasi masyarakat adat dan komunitas lokal. Padahal, pengabaian atas hak-hak mereka justru mengakibatkan ekosistem makin terancam.

Perlunya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan salah satu di antara 12 agenda yang dihasilkan pada Konferensi Forum Lingkungan Hidup Asia- Eropa, di Jakarta, Jumat (25/11).

Agenda lain dari hasil konferensi tiga hari itu meliputi strategi pembangunan berkelanjutan nasional, perlindungan lingkungan perbatasan wilayah di Eropa Tengah dan Asia Timur Laut, kemitraan dalam bidang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, pembiayaan berkelanjutan, mekanisme pembangunan bersih, akses terhadap informasi lingkungan hidup, transportasi perkotaan di Asia, dampak bahan kimia berbahaya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, konservasi keragaman hayati, energi, serta pengelolaan hutan tropis.

Dalam dokumen Jakarta 12-Agendas for Asia and Europe dipaparkan, sejarah dan riset membuktikan bahwa masyarakat adat maupun komunitas lokal mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Karena itu, pengarusutamaan pengelolaan sumber alam berbasis komunitas dalam kebijakan/kesepakatan multilateral, merupakan hal pokok untuk mendukung kesinambungan sumber daya alam sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal membutuhkan pengakuan atas nilai-nilai sosial dan budaya, dukungan politis, insentif ekonomi, serta keterampilan organisasi dan manajemen. (LAM)

